

Prostitusi di Thailand: Pertarungan Tatanan Dunia melalui Tiga Pendekatan

Frequency of International Relations
September, Vol 7 (2) 42 - 80

© The Author(s)

fetrian.fisip.unand.ac.id

Submission track :

Submitted : August 15, 2025

Accepted : September 29, 2025

Available On-line : January 28, 2025

Muhammad Fauzi Abdul Rachman

Hubungan Internasional, Universitas Pertamina

mfarachman@universitaspertamina.ac.id

Harviani Fajar Retno

Hubungan Internasional, Universitas Pertamina

Abstract

Prostitusi merupakan isu serius di Thailand dan menjadi tantangan bagi pemerintah serta masyarakatnya, padahal Thailand telah meratifikasi CEDAW pada tahun 1985 dan Palermo Protokol pada tahun 2013 yang merupakan legalitas bagi komitmen untuk menghapus eksploitasi seksual, termasuk prostitusi. Dari dua latar belakang yang bertentangan tersebut, penelitian ini menganalisis bagaimana propagasi ide dan norma antara hegemoni Barat melawan dunia ketiga, dalam hal ini Thailand, terkait ide dan norma prostitusi. Pertarungan ide dan norma tersebut, secara sederhana, adalah proses mengadopsi tatanan dunia, ide, dan norma terkait prostitusi ke dalam konteks lokal. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis melalui data sekunder. Tiga pendekatan tatanan dunia, yakni interaksi strategis, sosialisasi hegemonik, dan konstruksi sosial dipakai untuk melihat dinamika kekuasaan membentuk ide dan norma terkait prostitusi di Thailand. Ketiganya bermuara pada simpulan bahwa dinamika kekuasaan eksternal, yakni hipokrasi Barat dan perancangan Thailand sebagai tempat prostitusi di masa Perang Dingin, serta internal, yaitu ajaran Budhisme, kemiskinan, dan korupsi para elite Thailand, menyebabkan lestarnya prostitusi di Thailand. Dengan kata lain, lapisan global, regional, nasional, lokal, hingga rural di Thailand menerima dan membentuk penerimaan sendiri terkait materi serta ide dalam prostitusi.

Keywords: Ide; Norma; Prostitusi; Seks; Thailand; Pariwisata; Tatanan Dunia

Pendahuluan

Turisme telah berkembang pesat di Thailand sejak tahun 2000 (Kariyapol and Agarwal 2020) dan merupakan salah satu faktor signifikan dalam pembangunan ekonomi dan sosial Thailand (Ruttanavisanon and Agmapisarn 2022). Sebagai salah satu tujuan wisata utama dunia, Thailand berada di peringkat 13 negara di dunia dengan pendapatan dari turisme tertinggi dan peringkat ke-18 negara yang paling banyak dikunjungi wisatawan internasional (McDowall 2010). Thailand juga menjadi negara peringkat keempat dalam jumlah kedatangan turis di tahun 2015 dan Bangkok berada di peringkat kedua secara global dalam jumlah turis yang bermalam (Liu, Li, and Parkpian 2018). Pada tahun 2017, sekitar 21,2 persen *Gross Domestic Product* (GDP) Thailand berasal dari pariwisatanya (Butler and Dodds 2019). Turisme juga menyediakan 8,7 juta pekerjaan domestic yang setara dengan lebih dari 20% lowongan pekerjaan yang ada di Thailand

Namun, ada jenama/*branding* negatif terhadap wisata di Thailand, yakni pariwisata seks dan “Disneyland for Paedophiles”. Meskipun di Thailand prostitusi ilegal (Bales 2012; Weitzer 2021) dan tidak dipromosikan tetapi motivasi wisatawan asing datang ke Thailand salah satunya adalah untuk tujuan seks (Henkel et al. 2006). Bahkan, Thailand adalah negara tujuan pariwisata seks utama di Asia

Tenggara, dengan pendapatan 6,4 miliar USD per tahun (Wadekar 2023). Diperkirakan ada 300 ribu hingga 2,8 juta pekerja seks di Thailand (Vandecandelaere 2020). Selain itu, pariwisata seks membawa efek negatif, seperti meningkatnya jumlah kasus HIV/AIDS, perdagangan manusia (Mensendiek 1997) dan prostitusi anak (Lau 2008). Diperkirakan satu dari dua puluh pekerja seks komersial di Thailand terjat dalam perbudakan seks (Ehrenreich and Hochschild 2004). Sekitar 250 ribu pekerja seks rentan terhadap jerat perbudakan (Prachakul and Chuenban 2024). Kemiskinan, kekacauan politik, dan dinamika budaya turut mendorong lonjakan industri seks di Thailand (Roby and Tanner 2009), industri yang juga berkontribusi signifikan bagi ekonomi Thailand (Faudzi, Ahmad, and Ayob 2024).

Fenomena tersebut menyebabkan pemerintah Thailand berupaya mengubah pandangan buruk tersebut agar beralih dari “cap” sebagai tujuan wisata industri seks (Brody 2006) menjadi tujuan wisata pantai, belanja, dan kebudayaan (Ingram, Tabari, and Watthanakhomprathip 2013; Kontogeorgopoulos 2016; Henkel et al. 2006). Dengan kata lain, Thailand ingin beralih dari jenama tujuan wisata negatif (pariwisata seks) menjadi tujuan wisata dengan jenama yang positif seperti Bangkok Fashion City, Kitchen to the World, Health Hub of Asia, Amazing Thailand (Nuttavuthisit 2007), maupun Thai Smiles (Kidpromma 2022).

Dengan menggunakan tiga perspektif tatanan dunia (interaksi strategis, sosialisasi hegemonik, dan konstruksi sosial) untuk melihat cara ide dan norma disebarkan, penelitian ini menyimpulkan ide dan norma terkait prostitusi di Thailand akan sulit diubah, terlebih dihilangkan. Ketiga persepektif tatanan dunia bermuara pada kesimpulan bahwa prostitusi di Thailand lestari karena faktor eksternal, yakni hipokrasi dari hegemoni Barat serta sejarah “pemaksaan” Thailand menjadi tujuan wisata seks era Perang Dingin, dan faktor internal yang berlandaskan ajaran Buddha, kemiskinan, serta para elite yang korup di Thailand. Pada tulisan ini, ide dan norma dianggap serupa/saling menggantikan (*interchangeable*).

Prostitusi adalah jasa seksual yang dibayar sehingga seolah ada legitimasi untuk melakukan aktivitas tersebut (Benoit et al. 2019) dan seolah menjadi salah satu jenis pekerjaan seks. Menurut Weitzer (2009), pekerjaan seks melibatkan pertukaran jasa, pertunjukan, ataupun produk dengan imbalan materi. Pekerjaan seks dapat berupa kontak fisik secara langsung antara penjual dan pembeli (prostitusi masuk ke kategori ini) maupun tidak langsung seperti pornografi audio serta visual. Pekerja seks adalah salah satu komunitas yang paling termajiralkan (Lam 2020).

Sulit mencari pasti kapan prostitusi di Thailand dimulai tetapi pada abad ke-14, masa periode Ayyudhya (1350-1767) dan Raja Rama I (1782-1809), prostitusi sudah legal dan dikenai pajak, terutama di area yang dikuasai komunitas migran Cina di Sampeng, Bangkok (Boonchalaksi and Guest 1998). Pada awal abad ke-20, adanya keinginan Raja Rama V untuk menarik pajak dari pekerja seks dan membiayai pembangunan infrastruktur (*road tax*), maka pekerjaan seks dilegalisasi dan diregulasi pada 1903 (Kidpromma 2022). Kemudian, lewat the Contagious Disease Act of 1908, prostitusi di Thailand menjadi legal hingga tahun 1960 (Lemberger and Waters 2022). Setelah itu, disahkan the Prostitution Suppression Act pada tahun 1960 yang membuat prostitusi berubah menjadi ilegal di Thailand.

Masalah prostitusi terus meningkat disebabkan salah satunya oleh adanya global kapitalisme yang menciptakan ketimpangan sosial (Iñiguez de Heredia 2008; Benoit et al. 2019). Masalah muncul ketika individu yang dibeli jasanya justru dieksploitasi (terutama perempuan), dipaksa untuk menjual, mendapat konsekuensi buruk (misalnya kesehatan, ekonomi, sosial), dan terjadi ketimpangan dalam relasi gender, ras, serta kelas tertentu. Di Phayao, Thailand, misalnya, lemahnya kepemimpinan perempuan membuat prostitusi terus berlangsung (Nishizaki 2011). Selain itu, ketidakjelasan status kewarganegaraan membuat perempuan dari etnis minoritas-marjinal

seperti Hmong, Akha, Karen, dan Shan menjadi mayoritas pekerja seksual di Thailand dan rentan untuk dilecehkan (Mah 2011).

Prostitusi bisa menjadi salah satu tujuan orang berwisata, yang disebut dengan *sex tourism*. Pariwisata ini mengacu kepada wisatawan (biasanya pria) yang datang ke negara lain dengan tujuan spesifik membeli jasa seksual kepada pria/wanita lokal (Enloe 2014). Industri ini bisa langgeng karena faktor kemiskinan dan keuntungan yang tinggi dari operasinya (Willis and Levy 2002).

Pandangan kaum feminis terbelah terkait prostitusi, sebagian menganggap prostitusi adalah pekerjaan yang menjual salah satu bagian tubuh seperti pekerjaan lainnya (Nussbaum 1998) dan feminis sebagian lainnya melihat prostitusi sebagai pelanggaran terhadap hak asasi perempuan. Meskipun ada perbedaan pandangan terkait pekerjaan seks, kaum feminis dianggap berhasil ketika lebih dari 80 negara menandatangani ‘Protocol to Suppress, Prevent and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children’ (The Trafficking Protocol) di Palermo, Italia pada tahun 2000 (Doezema 2005). Artinya, ada tatanan dunia secara global yang coba dibentuk agar ada pemahaman universal bahwa prostitusi adalah hal yang menyalahi aturan dan hak asasi perempuan harus dilindungi. Selain itu, ada pula dikotomi terkait kriminalisasi terhadap prostitusi, yakni

abolisionisme yang berfokus pada kriminalisasi penjual jasa seksual, dan neo-abolisionisme yang justru mengkriminalisasikan pembeli jasa seksual (Ward and Wylie 2017).

Pembentukan ide dan norma di politik dunia bukanlah hak prerogatif aktor *powerful*, juga bukan adopsi sepenuhnya dari luar negara yang diadopsi oleh aktor-aktor lokal, melainkan pertarungan terus-menerus, bertimbang-balik, dan bersirkulasi antara aktor luar dan lokal (Acharya 2018). Dalam paper ini, ide dan norma tersebut adalah mengenai prostitusi di Thailand dalam situasi politik global yang didominasi oleh Barat. Kontestasi dalam membentuk tatanan global selalu terbuka bagi semua aktor, bukan hanya dari pemikiran Barat yang selama ini mendominasi tatanan dunia dan norma yang berlaku. Meskipun demikian, *power* tetap menjadi determinan penting dalam pembentukan ide dan norma pada tatanan dunia.

Homogenisasi atas ide dan norma, bagi Acharya (2018), utamanya ditransmisikan oleh institusi internasional tetapi akan selalu diadu-tarungkan dengan aspek lokal maupun regional. Dalam tulisan ini, tidak hanya aturan/tatanan dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) ataupun pandangan Amnesty International terkait prostitusi saja yang membentuk bangunan *global order* tetapi norma dan ide dari aktor atau agensi di level lokal, dalam hal ini Thailand serta ajaran Buddhanya,

juga akan mentransformasikan dan membentuk kembali tata aturan terkait prostitusi. Oleh karena itu, bagaimana rasionalisasi prostitusi dipraktikan atau tidak dipraktikan di dunia ini akan terus diperdebatkan oleh berbagai pihak, baik hegemonik maupun nonhegemonik.

Berlandaskan karya Amitav (2018), artikel ini menggunakan tiga pendekatan tatanan dunia untuk menganalisis isu ini, yakni interaksi strategis dari Keohane dan Goldstein, sosialisasi hegemonik dari Cox, Ikenberry, dan Kupchan, serta konstruksi sosial yang erat dengan pendekatan konstruktivisme.

Interaksi strategis melihat institusi internasional-lah yang memainkan peran penting dalam penyebaran ide. Ide akan memandu aksi dan memengaruhi interaksi strategis antaraktor agar mendapatkan hasil yang lebih efisien. Pendekatan pertama ini juga melihat *power* sebagai determinan dalam penerimaan maupun penolakan ide-ide baru. Bagi Keohane dan Martin (1984), institusi dan rezim internasional berfungsi sebagai tempat distribusi *power*, sehingga para teoris kontraktualis menganggap pembentukan institusi adalah keinginan negara hegemonik atau kelompok kecil negara-negara kuat untuk menjaga *power*-nya. Di sisi lain, negara lemah hanya dapat menggunakan institusi dan rezim internasional untuk mendapatkan

keuntungan atau kepentingannya tetapi tidak dapat mengubah ide dan norma yang fundamental. Pendekatan ini cenderung bersifat rasionalis atau egois dibandingkan reflektivis (Keohane and Goldstein 1993).

Kedua, sosialisasi hegemoni yang memiliki tiga variasi, yakni realisme struktural, Gramscian teori, dan *institutional-binding*. Varian realisme struktural dalam teori sosialisasi hegemoni dapat dilihat ketika norma hanya dapat disebarkan oleh aktor yang *powerful* karena mereka memiliki kemampuan untuk mengeksternalisasikan ideologi mereka (Moravcsik 1998). Ide-ide hegemoni dipaksakan oleh aktor-aktor hegemoni berlandaskan *power*. Dengan kata lain, agar ide sukses disebarkan, butuh kesungguhan hegemoni dalam menanamkan ide ke negara-negara lain. Sebagai contoh ketika Amerika Serikat menyebarkan norma dan ide tentang *Global War on Terrorism* atau hak asasi manusia secara global agar diterapkan oleh seluruh negara. Teori ini melihat bagaimana penyebaran norma dan perubahan digunakan oleh negara utama (*leading state*) untuk menanamkan nilai-nilai yang mereka pilih ke negara-negara yang tidak utama (*lesser*) (Acharya 2018).

Pada varian lain, Cox (1987), yang bercorak neo-Gramscian, berpendapat bahwa hegemoni bukan hanya soal historis materialisme (seperti tradisional Marxisme) melainkan juga aspek ide (Gramscian).

Cox, sama seperti variasi realisme struktural, juga menekankan pada peran *power*, tetapi baginya *power* tersebut tersembunyi dalam menciptakan norma dan ide agar dapat menciptakan kesepakatan (*consent*). Kesepakatan tersebut diperlukan semata-mata agar tatanan dunia versi negara hegemoni dapat tercipta, bersumberkan pada dukungan, persamaan kepentingan, dan perspektif ideologi dari negara lain (yang lebih kecil). Artinya, norma dan ide hegemoni bukan hanya sesuatu yang dipaksakan (*coercion*) oleh negara kuat tetapi harus juga didukung melalui bentuk *consent* atau kesepakatan atas ide dan norma yang dilegitimasi bersama melalui institusi regional maupun global. *Consent* tersebut dihasilkan dari negara supremasi (berdasarkan *power*) yang menawarkan keuntungan bagi negara *less powerful* (berdasarkan kepentingan bersama). Gramsci meminjam pemikiran Machiavelli: setengah manusia, setengah binatang buas, kombinasi dari *consent* dan *coercion* (Cox, 1983).

Varian terakhir dari sosialisasi hegemoni dikembangkan oleh Ikenberry dan Kupchan. Mereka menekankan faktor material (kemampuan militer, kontrol terhadap barang mentah, pasar, modal, serta keuntungan kompetitif atas barang bernilai tinggi) dan juga ideasional (ideologi yang digunakan hegemonik untuk mengembangkan tatanan dunia sesuai norma yang menjustifikasi kekuasaan hegemonik). Varian ketiga ini menekankan bahwa *power* dapat

digunakan untuk memaksa (*coercion*) dan menyosialisasikan (*socialisation*) ide serta norma hegemonik ke negara lebih lemah dalam tatanan politik internasional (Ikenberry and Kupchan 1990). “Hak” untuk menata dunia karena mampu (memiliki faktor material dan ideasional) diperkuat dengan mengatur karena berhak (*rule based on right*) lewat institusi yang melegalkan. Inilah yang disebut dengan *institutional-binding* dengan prakondisi *after victory*, yang dapat diartikan situasi pascaperang. Yang kalah, menerima kesepakatan atau aturan dari institusi internasional untuk mengurangi ketakutan atas dominasi maupun eksploitasi (Ikenberry 2001). Sehingga, peran dari agensi negara lemah untuk mengatur tatanan dunia menjadi sangat kabur.

Ketiga, perspektif konstruksi sosial yang berasal dari konsep konstruktivisme. Perspektif ini menekankan kepada tujuan moral, bukan material. Ide-ide yang diterima oleh para aktor bukan untuk keuntungan, seperti pada perspektif interaksi strategis, tetapi karena ide tersebut dianggap mampu mentransformasikan perilaku yang lebih baik dan pantas. Konstruksi sosial menekankan pentingnya moral universal dan tidak melihat pentingnya dinamika di level lokal serta umpan balik dari budaya setempat. Bagi pendekatan ini, norma yang membuat klaim universal tentang apa yang baik akan lebih dapat disebarluaskan dibandingkan norma yang dilokalisasikan atau dikerucutkan. Sebagai contoh, norma tentang perlindungan ikan paus,

perlawanan terhadap rasisme, ataupun perlawanan terhadap genosida di Palestina. Norma-norma tersebut akan menihilkan norma-norma yang berlawanan di level lokal, bila ada. Beberapa kaum konstruktivis melihat perubahan norma tidak memerlukan bantuan kekuatan material atau aktor yang kuat (Finnemore and Sikkink 1998). Sebagai contoh tidak semua norma yang disebarkan superpower adalah norma yang baik, seringkali norma tersebut bersifat standar ganda dan bias budaya (Acharya 2018). Norma itu sendiri dapat memperkuat dirinya melalui mekanisme diskursus, persuasif, maupun konsultatif. Beberapa kaum konstruktivis lain melihat perubahan norma bergantung kepada material power. Misalnya, Wendt (2003), yang melihat hubungan *power* menentukan perubahan sosial yang kemudian menentukan perubahan struktur.

Semua pendekatan di atas berfokus pada bagaimana aktor melihat dan menggunakan *power* yang menggerakkan interaksi dengan aktor lain. Interaksi strategis dan sosialisasi hegemonik melihat *power* secara *top-down*, sedangkan konstruksi sosial bersifat *bottom-up*. Dari dimensi epistemologi, interaksi strategis bersifat rasional (meskipun melihat ide), sosialisasi hegemonik bercorak rasional-reflektivis, dan konstruksi sosial cenderung reflektivis. Namun, seringkali ketiganya bersentuhan ketika dihadapkan pada fenomena tertentu.

Metode Penelitian

Penelitian ini berangkat dari melihat bagaimana tatanan dunia melihat dan menyikapi isu prostitusi, salah satunya dilihat dari posisi PBB, terutama dalam Palermo Protocol tahun 2000 dan CEDAW tahun 1979. PBB dilihat sebagai institusi internasional yang mendifusikan norma dan ide ke seluruh dunia terkait prostitusi. Selain itu, objek lain yang dilihat adalah bagaimana prostitusi di Thailand menjadi salah satu tujuan utama wisatawan mancanegara untuk datang. Maka, ada pertentangan antara *power* milik Barat dan institusi yang diciptakan dan didominasi oleh Barat, dalam hal ini Amerika Serikat dan PBB, dengan Thailand sebagai negara Selatan terkait isu prostitusi.

Dalam studi kualitatif ini, data diambil dari berbagai sumber seperti artikel jurnal yang diakses melalui Google Cendekiawan menggunakan kata kunci *prostitution*, *Thailand*, *tourism*, dan kata kunci lain yang menggabungkan ataupun bersinonim dengan tiga kata tersebut. Dari hasil pencarian, setiap artikel dibaca pada bagian awalnya, seperti abstrak dan pendahuluan, untuk mencari tahu kebermanfaatan atau kesesuaian dengan penelitian ini. Bila artikel tersebut dianggap bermanfaat sebagai data, maka artikel tersebut digunakan dan sitasi. Berbagai buku terkait dengan pekerja seks dimanfaatkan untuk mempertajam analisis.

Setelah itu, setiap data yang ditemukan kemudian dianalisis menggunakan kerangka pemikiran dari tiga perspektif penyebaran ide dan norma dari buku Amitav Acharya (lihat kerangka pemikiran) yang berjudul *Constructing Global Order*. Setiap subvariabel pemikirannya digunakan untuk melihat bagaimana tatanan dunia versi Barat terkait prostitusi bertransformasi di Thailand karena adanya norma dan ide yang berbeda antara Thailand dengan dunia di luarnya. Dalam hal ini, perbandingan normatif protokol PBB dan institusi internasional lainnya terkait prostitusi atau perdagangan manusia dengan praktik prostitusi di Thailand. Temuan dihasilkan dari interpretasi penulis terhadap kumpulan data yang telah didapatkan, sehingga tidak terhindarkan dari unsur subjektivitas.

Hasil

Perempuan Thailand yang bekerja di sektor prostitusi, bisa bermotifkan terpaksa (*forced*) ataupun dengan sadar memilih/sukarela (*chosen*) (Roby and Tanner 2009). Kedua motif tersebut juga saling memengaruhi (Aoyama 2009). Tulisan ini tidak membedakan keduanya karena hanya akan berfokus pada bagaimana tatanan dunia terkait prostitusi ditransformasikan atau diprovinsialisasikan di Thailand.

Meskipun Amitav memisahkan tiga pendekatan dalam melihat bagaimana ide dan norma disebarkan, tetapi pendekatan

tersebut bisa saling berkaitan satu sama lain. Begitu pula dalam isu prostitusi di Thailand, baik interaksi strategis, sosialisasi hegemonik, maupun konstruksi sosial saling berkaitan dalam melanggengkan prostitusi atau menghalangi penyelesaian isu prostitusi di Thailand.

Diskusi dan Analisis

1. Interaksi Strategis

Berbagai konsensus internasional telah membuat peraturan mengenai pekerjaan seks. Dalam The 1949 Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and the Exploitation of the Prostitution of Others artikel 1, PBB menjelaskan bahwa pihak yang mengeksploitasi prostitusi untuk pihak lain harus dikenai hukuman. Artikel 2 lebih detail memaparkan pihak-pihak yang mengelola rumah pelacuran dapat dihukum. Sekitar 30 tahun setelahnya, The 1979 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) menyepakati untuk memberantas segala bentuk penjualan perempuan dan eksploitasi prostitusi perempuan. Kemudian, pada tahun 2000, lewat Palermo Protocol, UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children mencatat bahwa tindakan eksploitasi seksual, termasuk prostitusi, adalah pelanggaran hukum. Dapat disimpulkan bahwa tatanan global terkait prostitusi menurut PBB adalah hal yang ilegal.

Thailand meratifikasi CEDAW tahun 1985, komite dari PBB yang merekomendasikan bahwa mengkriminalisasikan konsumen prostitusi adalah strategi optimal untuk melawan perdagangan manusia di dalam maupun lintas batas negara atau yang disebut sebagai neo-abolisionisme. Setelah itu, diratifikasi pula Palermo Protocol pada tahun 2013 yang melegitimasi bahwa prostitusi ilegal di Thailand (Benoit et al. 2019). Di level domestik, Thailand memiliki Prevention and Suppression of Prostitution Act, B.E. 2539 tahun 1996 dan Act on Entertainment Places, B.E. 2509 yang melarang prostitusi perempuan maupun laki-laki di tempat umum maupun rumah bordil. Ada pula Prevention and Suppression Prostitution Act yang diamandemen pada tahun 2016 dan melegalkan penggerebekan kepada aktivitas seks komersial oleh polisi Thailand . Maka, prostitusi adalah hal yang ilegal di Thailand (Kempadoo 1998).

Isu prostitusi tidak hanya urusan moral dan etika (posisi PBB) tetapi ada pula keuntungan material yang didapat (sudut pandang Thailand). Dalam perspektif interaksi strategis yang menganggap aktor sebagai aktor yang rasional, Thailand dilihat sebagai aktor yang mencari keuntungan atau kebermanfaatan. Institusi yang memainkan peran penting dalam meregulasi serta mentransmisi ide dan norma terkait prostitusi adalah PBB. Baik Thailand maupun PBB, memiliki rasionalitas yang berbeda.

Sikap Thailand sebagai negara yang melanggengkan prostitusi dianggap rasional bila mengacu kepada keuntungan material yang didapat Thailand sebagai aktor rasional. Meskipun ada akibat-akibat lain yang menjadi efek lanjutan dari prostitusi seperti HIV, kekerasan seksual ataupun jenama buruk tentang turisme di Thailand yang bisa menjadi bumerang ke sektor ekonomi. Terlebih penghasilan dari pekerjaan di pabrik, sektor agrikultur, ataupun beasiswa sekolah bagi anak perempuan dari Kerajaan Thailand lebih kecil dibandingkan pendapatan menjual jasa seksual .

Sedangkan PBB justru melihat dari sisi nonmaterial, seperti hak asasi manusia, ketika melarang prostitusi sekaligus menghapus perdagangan manusia. Namun, dilema hak asasi manusia terjadi ketika, misalnya, menghapuskan prostitusi di Thailand sama dengan menegakkan HAM tetapi di sisi lain tanpa adanya prostitusi, misalnya, justru kemiskinan akut di Thailand membuat masyarakat miskin tidak bisa makan karena tidak punya pilihan pekerjaan lain yang lebih baik. Begitu juga dengan adanya legalitas polisi Thailand melakukan penggerebekan atas nama anti-prostitusi yang ditujukan untuk menghilangkan prostitusi justru penegakkan dilakukan lewat cara-cara yang melanggar HAM .

Institusi lain, yakni Amnesty International yang bercorakan organisasi nonpemerintahan global, justru memiliki ide dan norma yang berbeda dengan PBB terkait prostitusi. Amnesty International berpendapat bahwa prostitusi adalah soal kebebasan memilih sehingga tidak boleh mendapat perlakuan diskriminasi (32nd International Council Meeting Circular No. 18 2015 ICM circular: Draft policy on Sex Work, 2015). Selain itu, ada pula the International Committee for Prostitutes' Rights (ICPR) yang memperjuangkan hak-hak pekerja prostitusi dan eks-pekerja prostitusi.

Menurut Neuwirth (2015), Amnesty International, sebagai *global movement*, gagal memahami bahwa seks komersial bukan hanya soal konsensual tetapi lebih dalam dari itu, terkait pelecehan seksual, pemaksaan brutal, dan bias gender. Artinya, dalam institusi internasional pun terdapat perbedaan ide dan norma terkait prostitusi, sehingga *powerful actors* tidak bisa dengan bebas menentukan tatahan dunia menurut ide dan normanya sendiri mengenai prostitusi karena ada ide dan norma tandingan. Di level domestik, Thailand lebih condong merespons atau menyerap ide dan norma terkait dari Amnesty International maupun ICPR dibandingkan dengan PBB.

Perbedaan norma antara institusi internasional dan negara ini adalah pertarungan dinamika tatahan yang berbeda. Domestik

Thailand berfokus pada *cost and benefit* sedangkan PBB dan Amnesty Internasional, meskipun berbeda pandangan, memusatkan norma pada hak dasar manusia. Bila difokuskan pada relasi *power* level domestik untuk “menata” prostitusi di Thailand, perempuan muda yang dilihat sebagai posisi yang lemah (atau dalam analogi hubungan internasional sebagai *lesser state*) tidak bisa melawan atau bahkan merasakan keuntungan bersama dari adanya relasi kuasa yang lebih kuat, dalam hal ini jaringan pebisnis wisata (Ehrenreich and Hochschild 2004), pemimpin militer, polisi, maupun mucikari (Kempadoo 1998). Selain itu, Kempadoo (1998), juga melihat keuntungan bersama di level internasional dalam relasi jaringan hotel dan penerbangan yang bekerja sama dengan para elite pebisnis-militer yang terus mempromosikan industri wisata seks. Ia juga memperkirakan keuntungan yang dihasilkan setiap tahunnya berjumlah USD lima miliar.

Fenomena prostitusi di Thailand juga sudah melampaui batas negara, misalnya, perempuan di Thailand dikirim untuk pekerjaan seks ke Jepang (Aoyama 2009), Taiwan, dan 3.000 pekerja seks di Berlin berasal dari Thailand, sebaliknya perempuan-perempuan Myanmar dan Rusia didatangkan ke Thailand untuk bekerja di bidang prostitusi (Williams 1999). Artinya, keuntungan ekonomi bersama tidak hanya dirasakan oleh Thailand, tetapi sudah lintas batas negara dan memengaruhi tatanan dunia. Sesuai dengan pendekatan interaksi

strategis, yang berpendapat rasionalis dan materialis (dalam hal ini keuntungan bisnis prostitusi) lebih penting dibandingkan ranah ide (moralitas dalam prostitusi), maka prostitusi di Thailand akan terus berjalan selama masih memberikan keuntungan ekonomi bagi para aktor yang terlibat di domestik maupun internasional. Situasi tersebut membuat adanya interaksi strategis berbagai negara.

Dari analisis ini, dapat dilihat bahwa norma dan ide yang berasal dari eksternal tidak selalu bersifat tunggal. Dalam kasus prostitusi di Thailand ada perbedaan norma antara PBB (aktor organisasi internasional) dan Amnesty Internasional (organisasi non-pemerintah/lembaga swadaya masyarakat internasional) terkait prostitusi. Adanya perbedaan ini membuat Thailand dapat dilihat sebagai menerima (dari kaca mata Amnesty Internasional) ataupun menolak (dari sudut pandang PBB) norma yang disebarkan oleh *power* dari institusi internasional.

2. Sosialisasi Hegemonik

Thailand adalah salah satu wilayah yang banyak didatangi oleh orang kaya Eropa karena adanya penjajahan terhadap

negara-negara di sekitar Thailand (Brody 2006). Pada masa Perang Vietnam, tepatnya di tahun 1966-1967, Thailand mengeluarkan aturan the Entertainment Act yang menata operasi berbagai tempat hiburan (panti pijat, klub malam, dan bar) yang menjadikan militer Amerika Serikat sebagai klien utama (Kontogeorgopoulos 2016; Butler and Dodds 2019; Williams 1999; Lemberger and Waters 2022; Malikhao 2017). Thailand dijadikan tempat hiburan seks (Hung 2024a), industri seks (Montgomery 2015) atau wisata seksual bagi prajurit Amerika Serikat yang berperang, dengan sebutan industri “Rest and Recreation” (R&R) (Truong 1990; Gray 2012) di area seperti Patpong di Bangkok (Brody 2006). Setelah itu, masyarakat Thailand di pedesaan banyak yang mengirimkan anak perempuannya ke dunia prostitusi demi bertahan hidup yang membuat lebih berharganya nilai anak perempuan dibandingkan laki-laki (Truong 1990).

Dalam pendekatan sosialisasi hegemoni, terlihat bahwa hegemoni Amerika Serikat atas Thailand menyebabkan terjadinya “penaklukan” terhadap turisme di Thailand agar difokuskan untuk melayani prajurit Amerika Serikat. Periode *after victory* (pascaperang) versi Ikenberry juga terlihat ketika Amerika Serikat melanjutkan hegemoninya selepas Perang Dingin berakhir, yang berarti terus memperkuat legitimasi ide dan norma bahwa Thailand adalah tujuan

wisata seksual pasca-1960 (Jeffrey 2002), meskipun kali ini bukan hanya untuk prajurit Amerika Serikat, tetapi juga Eropa (Brody 2006).

Dalam hal ini, Barat (Amerika Serikat dan Eropa) sedang melakukan hipokrasi, di satu sisi mereka menggaungkan anti perdagangan manusia lewat PBB, yang salah satunya berimbas pada prostitusi, di sisi lain mereka juga konsumen terbesar prostitusi di Thailand. Bahkan, mayoritas bar bergaya Barat di Thailand yang menjajakan perempuan dimiliki oleh orang Barat berkulit putih, yang disebut dengan *farangs* (Weitzer 2021).

Ketika masuk ke era globalisasi pasca-Perang Dingin, dalam dimensi ekonomi, kekuatan Barat dengan ekonomi liberalismenya mengeksploitasi ekonomi negara Selatan yang lebih miskin lewat International Monetary Fund's Structural Adjustment Program (SAP) dan the General Agreement of Tariffs and Trade (GATT) yang menyebabkan pekerja perempuan di Thailand semakin tereksplorasi (Malikhao 2017). Dalam relasi *power* secara global, gerakan pejuang hak-hak pekerja seks global di tahun 1990-an juga didominasi oleh *global north* (atau pekerja seks dari negara-negara utara) pada berbagai Kongres Pekerja Seks Dunia, sedangkan perwakilan dari *global south* cenderung minim hingga tahun 1990 akhir (Mgbako 2020). Negara Utara yang mendominasi, lebih bisa menggunakan hegemoninya di

dalam isu prostitusi. Di level internasional atau global, dominasi Utara terhadap Selatan sampai pula pada ranah prostitusi. Utara menjadikan Thailand tujuan pariwisata seks dan berimbas pada eksploitasi perempuan di Thailand.

Sebagai warga negara dari negara yang masuk ke kategori *South*, pekerja seks dari Thailand tidak terlalu direpresentasikan di dalam level yang lebih tinggi. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Thailand, sebagai negara Selatan, bukanlah kekuatan global maupun regional yang mampu membentuk atau menggerakkan tatanan global seperti negara Utara. Thailand hanya bereaksi tanpa menunjukkan penolakan untuk menantang tekanan dari hegemonik (Freedman 2022). Status tersebut membuat Thailand tidak dapat mengontrol secara penuh “pembentukan” kebijakan domestiknya sesuai dengan ide dan normanya sendiri.

Lebih jauh, di level domestik pun relasi kuasa bermain dalam langgengnya prostitusi di Thailand. Berbagai tokoh berkuasa dari birokrasi, militer, polisi, maupun politisi memfasilitasi praktik prostitusi di Thailand (Williams 1999). Fenomena ini sesuai dengan pendapat Ikenberry dan Kupchan (1990) bahwa untuk menciptakan norma yang mengakar di negara kelas dua, sosialisasikanlah norma dan ide kepada komunitas elitnya. Hasilnya, sikap pemerintah Thailand

selalu ambigu terkait isu prostitusi karena bila dihilangkan maka pendapatan tinggi yang ekstrem para pejabat polisi di Thailand akan menurun (Bales 2012).

Lestarnya praktik prostitusi di Thailand, yang disebabkan adanya keuntungan material bagi elite maupun kaum miskin, dalam jangka waktu tertentu akan membuat ide dan norma bahwa prostitusi di Thailand adalah hal yang wajar. Dengan kata lain, akan terbentuk “konsensus ideologis” antara hegemonik historis (Utara/polar dalam Perang Dingin), yang membentuk konsensus dan koersif, dengan nonhegemonik (Selatan) yang tidak sadar karena tertutupi keuntungan material.

Varian neo-Gramscian dalam sosialisasi hegemoni juga dapat dilihat dari berbagai literatur fiksi/novel yang ditulis oleh laki-laki asal Barat yang menyederhanakan dan membentuk stereotipe prostitusi di Thailand menurut sudut pandang imperialisme Barat . Ide yang disebarkan tersebut menjadikan narasi seolah Thailand adalah tempatnya prostitusi dan dapat mengkristal menjadi: prostitusi di Thailand adalah hal wajar. Dengan kata lain, ada *consent* yang diciptakan oleh *power* yang tersembunyi. Hal ini sejalan dengan pemikiran Gramsci yang berpendapat bahwa ranah ide dan material tidak pernah terpisahkan dan saling memengaruhi (Cox 1983).

Oleh karena itu, prostitusi di Thailand akan sulit dihapuskan karena adanya keuntungan material hegemonik domestik yang membentuk norma dan ide prostitusi lokal. Apabila hegemoni domestik (yang selama ini dijalankan oleh elite politik dan militer Thailand) mengalami pelemahan yang memungkinkan dihapuskannya praktik prostitusi, serta muncul gerakan perlawanan dari kelompok-kelompok (*bottom*) yang mendukung penghapusan tersebut, maka konsensus ideologis antara Utara dan Selatan yang akan menjadi faktor kunci (*top-down*) dalam mempertahankan keberlangsungan praktik prostitusi di Thailand. Analisis dari pendekatan kedua ini membuktikan bahwa sifat *top-down* tidak selalu berarti dimensi eksternal (*top*) memengaruhi internal (*bottom*). Hubungan *top-down* juga dapat terjadi di ranah domestik.

3. Konstruksi Sosial

Populasi di Thailand 95%-nya beragama Buddha (Ruttanavisanon and Agmapisarn 2022) dan mereka mempraktikkan ajarannya (Aggadhammo, Piyabhani, and Bunlers Puññamedhī 2024). Ajaran Buddha memainkan peran besar di kehidupan masyarakat Thailand (Kuppako 2018) seperti di sektor pendidikan, pemerintahan, maupun seremoni kenegaraan Thailand (Mérieau 2018). Selain di kehidupan

sehari-hari, ajaran Buddha juga digunakan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan negara (Dubus 2017).

Truong (1990) menjelaskan bahwa di Thailand, *Therevada Buddhism* memainkan peran penting dalam pembentukan hukum, budaya, dan kehidupan sosial di Thailand. Ia juga berpendapat bahwa ajaran *Buddhism* memiliki bias gender, salah satunya dengan melihat aktivitas seksual sebagai aktivitas yang terikat dengan kehidupan dan tubuh perempuanlah yang menjadi sumber alamiah hasrat seksual. Hal tersebut menunjukkan adanya diskriminasi terhadap perempuan dalam budaya Buddhisme Thailand, termasuk ajaran Brahmanisme yang percaya perempuan adalah kotor dan aib bagi keluarga (Malikhao 2017). Dalam budaya berbasiskan ajaran Buddha, perempuan adalah “warga” kelas dua (Jeffrey 2002) dan aktivitas seksual bukanlah dosa, melainkan gabungan keterikatan antara dunia fisik dan alam (Bales 2012).

Meskipun ada pendapat yang menyatakan budaya Buddha yang dominan di Thailand tidak menerima adanya pekerjaan seksual (Kidpromma 2022) tetapi pendapat lain menunjukkan sistem kepercayaan agama tersebut berkontribusi dalam tingginya tingkat prostitusi di Thailand. Ada pula kepercayaan terhadap karma yang membuat para pekerja seks komersial dari keluarga miskin

menyumbangkan uang atau persembahan kepada keluarganya dan kuil agar di kehidupan selanjutnya setelah reinkarnasi, mereka dapat hidup lebih baik (Mensendiek 1997). Bila dilihat dari tatanan ide dan norma, maka Buddha sebagai agama mayoritas berperan penting dalam tantangan penghapusan prostitusi di Thailand. Moral dan standar kepantasan yang didasari dari ajaran Buddha tidak melihat hak-hak perempuan sebagai yang utama, karena adanya bias gender yang terkandung di ajarannya.

Prostitusi di Thailand sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan kuno di Siam atau Thailand (Jeffrey 2002). Di kehidupan masyarakat Thailand juga ada sejarah panjang tentang selir yang menandakan simbol atau status kekayaan seseorang. Hal ini membuat perempuan dikomodifikasi sebagai ekspresi dari kepemilikan *power* (Brody 2006). Raja Rama IV dan V juga terlibat dalam penempatan dan penjualan para perempuan di “rumah” prostitusi, kemudian ketika Raja Rama V menghapuskan perbudakan pada tahun 1905, para budak tersebut secara suka rela menjadi pekerja seksual (Boonchalaksi and Guest 1998). Begitu pula dengan penerbitan The Contagious Disease Prevention Act pada tahun 1908 yang justru melanggengkan praktik prostitusi.

Masyarakat Thailand yang sejak tahun 1238 berada di bawah kerajaan, akan terpengaruh oleh arahan dari raja yang berkuasa, dalam hal ini juga terkait dengan prostitusi. Pengaturan dari raja-raja tersebut mengonstruksi masyarakat dengan pandangan yang mewajarkan prostitusi. Ide tersebut dibentuk/dikonstruksi dan terus menjadi simbol interaksi yang dianggap sebagai moral yang berlaku atau standar kepantasan yang biasa.

Selain itu, meskipun bersifat patriarkis (Malikhao 2017), secara tradisional Thailand menganut sistem matriloal dan matrilineal. Tradisi ini membuat perempuan mengambil tanggung jawab dalam hal finansial keluarga, meskipun itu berarti harus menjual tubuhnya (Mensendiek 1997). Hasil dari konstruksi sosial tersebut salah satunya dapat dilihat dari statistik 43% dari laki-laki lajang dan 50% dari laki-laki yang sudah menikah pernah mengunjungi prostitusi di timur laut Thailand (Maticka-Tyndale et al. 1997). Transformasi agrikultur juga membuat perubahan pada pembagian warisan, yang tadinya sebagian besar warisan untuk anak perempuan berubah menjadi dibagi rata antara anak laki-laki maupun perempuan sehingga secara sosial-ekonomi perempuan harus ikut mencari pekerjaan (Boonchalaksi and Guest 1998).

Faktor-faktor seperti kebutuhan dan hutang keluarga, keinginan untuk lepas dari kemiskinan, pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder, meningkatnya budaya konsumtif, tekanan sosial untuk terlihat hidup mewah, serta kesempatan untuk hidup lebih baik menjadi faktor penyebab munculnya wisata seks di Asia Tenggara (Nuttavuthisit 2007). Kebutuhan yang mendesak membentuk nilai-nilai yang dianut. Bahkan, di kisaran 1977-1997, keluarga di Thailand lebih memilih menjual anak gadisnya daripada harus kehilangan sawah demi melunasi hutang (Ehrenreich and Hochschild 2004).

Di sebuah wilayah pinggiran resor turis di Thailand (disamarkan dengan nama Baan Nua), pendapatan seorang anak dari prostitusi lebih besar dari orang tuanya yang bekerja dan justru membuat keluarga/komunitas tersebut terjaga (Montgomery 2014). Bila pendapatan dan lingkungan di tempat prostitusinya baik, maka para perempuan Thailand akan menganggap dirinya sebagai “pekerja” (*worker*) (Aoyama 2009). Pekerja seks komersial mengirimkan sekitar 300 juta USD ke area rural setiap tahunnya, angka yang lebih besar dari proyek pembangunan pemerintah yang pernah ada (Jolley 2018).

Dari fenomena di atas terlihat bahwa prostitusi di Thailand juga terbangun dari bawah. Situasi yang mendesak membuat prostitusi adalah pilihan yang rasional bagi masyarakat marjinal di Thailand.

Praktik tersebut dilakukan secara turun temurun, bahkan sudah menyentuh tiga generasi sejak Amerika Serikat mengonstruksi Thailand sebagai pusat R&R (Montgomery 2014). Sehingga, ada pembentukan norma dan ide dalam mewajarkan prostitusi dan menjadikan fenomena ini sebagai sesuatu yang banal.

Selain konstruksi sosial dari *bottom* yang terbawah (masyarakat marjinal), penyuapan kepada polisi, juga mendukung aktivitas ilegal ini menjadi langgeng (Hung 2023) dan dapat ditoleransi (Weitzer 2021). Bagi kaca mata neo-Gramscian versi Cox, prostitusi di Thailand menjadi terlegitimasi karena para pengambil keuntungan ekonomi dari prostitusi (*elites*) menghapuskan sendiri perlawanan terhadap ide hegemonik (berjalannya prostitusi). Dari tiga pilar utama nasionalisme di Thailand: kerajaan, militer, dan birokrat (Freedman 2022), setidaknya dua pilar (militer dan polisi serta birokrat) membentuk norma dan ide terkait terus berlangsungnya prostitusi di Thailand.

Kesimpulan

Dilihat dari tiga pendekatan tatanan dunia, prostitusi di Thailand akan terus lestari karena adanya dinamika kekuasaan (*power*) yang bermain dari pihak eksternal maupun internal. Berdasarkan sudut pandang interaksi strategis, ada perbedaan ide dan norma dari dimensi eksternal, antara yang mendukung dan mengutuk

prostitusi. Namun, dimensi internal yang lebih mementingkan faktor material dibandingkan ideasional, membuat prostitusi bisa terus berjalan di Thailand.

Dari eksternal, hipokrisi hegemoni (dalam hal ini dunia Barat, yang salah satunya melalui PBB dan Amerika Serikat pascaPerang Dingin) terlihat dalam pelarangan prostitusi ke Thailand sekaligus sebagai pembentuk norma dan ide lewat sejarah memaksa (*coercion*) untuk menjadikan Thailand tempat tujuan “wisata” seks.

Hipokrisi tersebut juga sejalan dengan dimensi internal Thailand yang juga menguatkan terus berlangsungnya aktivitas tersebut. Adanya kepentingan (korupsi) elite Thailand dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Thailand yang tidak ideal, mendukung terus berlangsungnya praktik prostitusi di Thailand. Prostitusi menjadi sumber pemasukan bagi devisa negara, elit yang korup, masyarakat menengah ke bawah, maupun kaum miskin di Thailand. Dengan kata lain, “perlawanan lokal” terkait praktik ini menjadi hampir tidak ada karena faktor material (keuntungan ekonomi) yang memainkan *power* untuk keberlangsungan prostitusi. Selain itu, faktor ideasional (pewajaran) yakni budaya turun temurun dan kepercayaan *Buddhism* yang mendiskreditkan perempuan juga membiarkan praktik tersebut tetap lestari di Thailand.

Daftar Pustaka

- Acharya, Amitav. 2018. *Constructing Global Order: Agency and Change in World Politics*. Cambridge University Press.
- Aggadhammo, Phra Rurugvit, Phramaha Nantakorn Piyabhani, and Phramaha Bunlers Puññamedhī. 2024. "Influence of Thai Cultural Patronage of Buddhism by Kings in the Past on Thai Culture." *Journal of MCU Languages and Cultures* 4 (2).
- Amnesty International. 2015. 32nd International Council Meeting Circular No. 18 2015 ICM circular: Draft policy on Sex Work.
- Aoyama, Kaoru. 2009. *Thai Migrant Sexworkers: From Modernisation to Globalisation*. Palgrave Macmillan.
- Bales, Kevin. 2012. *Disposable People: New Slavery in the Global Economy*. University of California Press.
- Benoit, Cecilia, Michaela Smith, Mikael Jansson, Priscilla Healey, and Doug Magnuson. 2019. "The Prostitution Problem: Claims, Evidence, and Policy Outcomes." *Archives of Sexual Behavior* 48 (7). Springer New York LLC: 1905–23. doi:10.1007/s10508-018-1276-6.
- Boonchalaksi, Wathinee, and Philip Guest. 1998. "Prostitution in Thailand." In *The Sex Sector: The Economic and Social Bases of Prostitution in Southeast Asia*, 130–69. Geneva: International Labour Organization.
- Brody, Alyson. 2006. "Prostitution in Thailand: Perceptions and Realities." In *International Approaches to Prostitution: Law and Policy in Europe and Asia*, edited by Geetanjali. Gangoli and Nicole Westmarland, 214. Policy Press.
- Butler, Richard., and Rachel. Dodds. 2019. *Overtourism: Issues, Realities and Solutions*. De Gruyter.

- Cox, Robert W. 1983. "Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method." *Millennium - Journal of International Studies* 12 (2): 162–75. doi:10.1177/03058298830120020701.
- Cox, Robert W. 1987. *Production, Power and World Order: Social Forces in the Making of History*. Columbia University Press.
- Decker, Michele R, Heather L McCauley, Dusita Phuengsamran, Surang Janyam, and Jay G Silverman. 2011. "Sex Trafficking, Sexual Risk, Sexually Transmitted Infection and Reproductive Health among Female Sex Workers in Thailand." *Journal of Epidemiology and Community Health* 65 (4): 334–39. doi:10.1136/jech.2009.096834.
- Doezema, Jo. 2005. "Now You See Her, Now You Don't: Sex Workers at the UN Trafficking Protocol Negotiations." *Social and Legal Studies* 14 (1): 61–89. doi:10.1177/0964663905049526.
- Dubus, Arnaud. 2017. *Buddhism and Politics in Thailand*. *Buddhism and Politics in Thailand*. Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporaine. doi:10.4000/books.irasec.2951.
- Ehrenreich, Barbara, and Arlie Russell Hochschild. 2004. *Global Woman: Nannies, Maids, and Sex Workers in the New Economy*. New York: A Metropolitan/Owl Book.
- Enloe, Cynthia. 2014. *Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics*. University of California Press.
- Faudzi, Alia Shahira Mohamad, Yarina Ahmad, and Nor Azira Ayob. 2024. "Prostitution in Southeast Asia: A Multifaceted Examination of Legal, Social, and Cultural Dimension." *International Journal for Studies on Children, Women, Elderly and Disabled* 20.
- Finnemore, Martha, and Kathryn Sikkink. 1998. "International Norm Dynamics and Political Change." *International Organization* 52 (4): 887–917. doi:10.1162/002081898550789.
- Freedman, Amy. 2022. "Awkward Powers: Escaping Traditional Great and Middle Power Theory." In *Awkward Powers: Escaping Traditional Great and Middle Power Theory*, edited by Gabriele

Abbondanza and Thomas Stow Wilkins. Palgrave Macmillan.
<http://www.palgrave.com/gp/series/15583>.

Gray, G.T. 2012. *Angels of Pattaya: Inside the Secret World of Thai Prostitution*. Maverick House.

Henkel, Roy, Pattaya Henkel, Wendy Agrusa, Jerome Agrusa, and John Tanner. 2006. "Thailand as a Tourist Destination: Perceptions of International Visitors and Thai Residents." *Asia Pacific Journal of Tourism Research* 11 (3): 269–87. doi:10.1080/10941660600753299.

Hung, Jason. 2023. "Why Legalizing Prostitution in Thailand Can Help Bangkok Regulate Commercial Sex and Curb Sex-Trafficking Systematically and Institutionally." *Frontiers in Sociology* 8. Frontiers Media SA. doi:10.3389/fsoc.2023.1227247.

———. 2024a. "An Overview of Legalising Prostitution in Thailand." In, 1–14. doi:10.1007/978-981-99-8448-0_1.

———. 2024b. "Institutional Construction of Prostitution in Thailand." In, 35–51. doi:10.1007/978-981-99-8448-0_3.

Ikenberry, John. 2001. *After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order after Major Wars*. Princeton University Press.

Ikenberry, John, and Charles A Kupchan. 1990. "Socialization and Hegemonic Power." *International Organization* 44 (3): 283–315. doi:10.1017/S002081830003530X.

Ingram, Hadyn, Saloomah Tabari, and Wanthanee Watthanakhomprathip. 2013. "The Impact of Political Instability on Tourism: Case of Thailand." *Worldwide Hospitality and Tourism Themes* 5 (1). Emerald Group Publishing Ltd.: 92–103. doi:10.1108/17554211311292475.

Iñiguez de Heredia, Marta. 2008. "People Trafficking: Conceptual Issues with the United Nations Trafficking Protocol 2000." *Human Rights Review* 9 (3): 299–316. doi:10.1007/s12142-007-0051-1.

Jeffrey, Leslie Ann. 2002. *Sex and Borders: Gender, National Identity, and Prostitution Policy in Thailand*. UBC Press.

- Jolley, Annelise. 2018. "Trick of the Light." *Hidden Compass*. <https://hiddencompass.net/story/trick-of-the-light/>.
- Kariyapol, Thanaporn, and Rohit Agarwal. 2020. "Economic Benefits and Consequences of Tourism in Developing Countries: A Case of Thailand." *Sripatum Review of Humanities and Social Sciences* 20 (1).
- Kempadoo, Kamala. 1998. *Global Sex Workers: Rights, Resistance, and Redefinition*. Edited by Kamala Kempadoo and Jo Doezema. New York and London: Routledge.
- Keohane, Robert O, and Lisa L Martin. 1984. "The Promise of Institutional Theory." *International Security* 20 (1): 39–51.
- Keohane, Robert, and Judith Goldstein. 1993. *Ideas and Foreign Policy: Beliefs, Institutions, and Political Change*. Edited by Robert Keohane and Judith Goldstein. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Kidpromma, Amnuaypond. 2022. "Buddhist Modernism and the Piety of Female Sex Workers in Northern Thailand." *Religions* 13 (4). MDPI. doi:10.3390/rel13040350.
- Kontogeorgopoulos, Nick. 2016. "Tourism in Thailand: Growth, Diversification, and Political Upheaval." In *The Routledge Handbook of Tourism in Asia*, 149. Routledge.
- Kuppako, Decha. 2018. "Buddhism in Thai Life: Thai Model for ASEAN." *Mahachula Academic Journal* 3 (1): 138.
- Lam, Elene. 2020. "Pandemic Sex Workers' Resilience: COVID-19 Crisis Met with Rapid Responses by Sex Worker Communities." *International Social Work* 63 (6). SAGE Publications Ltd: 777–81. doi:10.1177/0020872820962202.
- Lau, Carmen. 2008. "Child Prostitution in Thailand." *Journal of Child Health Care* 12 (2): 144–55. doi:10.1177/1367493508090172.
- Lemberger, Petra, and Tony Waters. 2022. "Thailand's Sex Entertainment: Alienated Labor and the Construction of Intimacy." *Social Sciences* 11 (11). MDPI. doi:10.3390/socsci11110524.

- Lines, Lisa. 2015. "Prostitution in Thailand: Representations in Fiction and Narrative Non-Fiction." *Journal of International Women's Studies* 16 (3): 86–100.
- Liu, Yaping, Yinchang Li, and Parnpree Parkpian. 2018. "Inbound Tourism in Thailand: Market Form and Scale Differentiation in ASEAN Source Countries." *Tourism Management* 64 (February). Elsevier Ltd: 22–36. doi:10.1016/j.tourman.2017.07.016.
- Mah, Megan. 2011. "Trafficking of Ethnic Minorities in Thailand: Forced Prostitution and the Perpetuation of Marginality." *Undercurrent Journal*, 65–72.
- Malikhao, Patchanee. 2017. "Violence Against Thai Females." In *Culture and Communication in Thailand*. Springer Nature Singapore Ltd. <http://www.springer.com/series/13565>.
- Maticka-Tyndale, Eleanor, David Elkins, Melissa Haswell-Elkins, Darunee Rujkarakorn, Thicumporn Kuyyakanond, and Kathryn Stam. 1997. "Contexts and Patterns of Men's Commercial Sexual Partnerships in Northeastern Thailand: Implications for AIDS Prevention." *Soc. Sci. Med* 44 (2): 199–213.
- McDowall, Siriporn. 2010. "International Tourist Satisfaction and Destination Loyalty: Bangkok, Thailand." *Asia Pacific Journal of Tourism Research* 15 (1): 21–42. doi:10.1080/10941660903510040.
- Mensendiek, Martha. 1997. "Women, Migration and Prostitution in Thailand." *International Social Work* 40: 163–76.
- Mérieau, Eugénie. 2018. "Buddhist Constitutionalism in Thailand: When Rājadharmā Supersedes the Constitution." *Asian Journal of Comparative Law* 13 (2). Cambridge University Press: 283–305. doi:10.1017/asjcl.2018.16.
- Mgbako, Chi Adanna. 2020. "The Mainstreaming of Sex Workers' Rights as Human Rights." *Harvard Journal of Law & Gender* 43: 92–136. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/90000/9789241506182_eng.pdf.
- Montgomery, Heather. 2014. "Child Prostitution as Filial Duty? The Morality of Child-Rearing in a Slum Community in Thailand."

Muhammad Fauzi A. R. & Harviani Fajar R.	Prostitusi di Thailand: Pertarungan Tatahan Dunia melalui Tiga Pendekatan
--	---

Journal of Moral Education 43 (2): 169–82.
doi:10.1080/03057240.2014.893420.

———. 2015. “Understanding Child Prostitution in Thailand in the 1990s.” *Child Development Perspectives* 9 (3): 154–57.
doi:10.1111/cdep.12122.

Moravcsik, Andrew. 1998. *Explaining the Emergence of Human Rights Regimes: Liberal Democracy and Political Uncertainty in Postwar Europe*. 98-17.

Neuwirth, Jessica. 2015. “Amnesty International Says Prostitution Is a Human Right-but It’s Wrong.” *The Guardian*. July 28.
<http://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/jul/28/amnesty>.

Nishizaki, Yoshinori. 2011. “Prostitution and Female Leadership in Rural Thailand: The Story of Phayao Province.” *Modern Asian Studies* 45 (6): 1535–97. doi:10.1017/S0026749X11000047.

Nussbaum, Martha C. 1998. ““Whether From Reason or Prejudice”: Taking Money For Bodily Services.” *Journal of Legal Studies* 27 (January).

Nuttavuthisit, Krittinee. 2007. “Branding Thailand: Correcting the Negative Image of Sex Tourism.” *Place Branding and Public Diplomacy* 3 (1). Springer Science and Business Media LLC: 21–30.
doi:10.1057/palgrave.pb.6000045.

Prachakul, Krueg, and Ruj Chuenban. 2024. “Thai Sex Workers, Rights Advocates Push to Decriminalize Prostitution.” *Benar News*, November 6. <https://www.benarnews.org/english/news/thai/thai-sex-workers-rights-advocates-push-to-decriminalize-prostitution-11052024140018.html>.

Roby, Jini L., and Jacob Tanner. 2009. “Supply and Demand: Prostitution and Sexual Trafficking in Northern Thailand.” *Geography Compass* 3 (1): 89–107. doi:10.1111/j.1749-8198.2008.00181.x.

Muhammad Fauzi A. R. & Harviani Fajar R.	Prostitusi di Thailand: Pertarungan Tatahan Dunia melalui Tiga Pendekatan
--	---

- Ruttanavisanon, Waret, and Charoenchai Agmapisarn. 2022. "Religious Tourism in Thailand - A Review of Thai Literature from 2012-2021." *Social Science Asia* 8 (1): 12–25.
- Truong, Thanh-Dam. 1990. *Sex, Money, and Morality: Prostitution and Tourism in South-East Asia*. London: Zed Books.
- Vandecandelaere, Hans. 2020. *Prostitution in Thailand: The Sex Workers' Perspective*.
- Wadekar, Neha. 2023. "Thailand Is a Global Capital of (Illegal) Sex Work." *Foreign Policy*, February 15. <https://foreignpolicy.com/2023/02/15/thailand-is-a-global-capital-of-illegal-sex-work/>.
- Ward, Eilis, and Gillian Wylie. 2017. *Feminism, Prostitution and the State: The Politics of Neo-Abolitionism*. Edited by Eilis Ward and Gillian Wylie. London and New York: Routledge.
- Weitzer, Ronald. 2009. *Sex for Sale: Prostitution, Pornography, and the Sex Industry*. Routledge.
- . 2021. "Interaction Rituals and Sexual Commerce in Thailand's Erotic Bars." *Journal of Contemporary Ethnography* 50 (5). SAGE Publications Inc.: 622–48. doi:10.1177/08912416211017253.
- Wendt, Alexander. 2003. *Social Theory of International Politics*. Cambridge University Press.
- Williams, Phil. 1999. *Illegal Immigration and Commercial Sex: The New Slave Trade*. Routledge.
- Willis, Brian M, and Barry S Levy. 2002. "Child Prostitution: Global Health Burden, Research Needs, And." *Public Health* 359 (April).

Acknowledgement/

Recognize those who helped in the research, especially funding supporter of your research financially. Include individuals who have assisted you in your study: Advisors, Financial supporters, or may another supporter, i.e. Proofreaders, Typists, and Suppliers, who may have given materials. Do not acknowledge one of the authors names.

Deklarasi Kepentingan yang Bertentangan

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan kepengarangan dan / atau publikasi artikel ini (Tulis deklarasi ini jika ana menggunakan bahasa Indonesia).

Biography/Biografi

Muhammad Fauzi Abdul Rachman adalah seorang pengajar di Universitas Pertamina. Tulisannya berfokus pada isu poskolonialisme, geopolitik kritis, teori kritis, dan budaya populer.

Harviani Fajar Retno adalah mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Pertamina